Journal of Muslim Community Health (JMCH) 2023. Vol. 4, No. 1. Page 1-17
https://doi.org/10.52103/jmch.v4i1.1188
OPEN ACCESS
E-ISSN 2774-4590

JOURNAL OF MUSLIM COMMUNITY HEALTH (JMCH)

Penerbit: Program Pascasarjana Kesehatan Masyarakat
Universitas Muslim Indonesia
Journal Homepage:
https://pasca-umi.ac.id/index.php/jmch

Original Article

Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang

Nur Amaliyah Riyadh, *Andi Surahman Batara, Andi Nurlinda

Magister Kesehatan Masyarakat, Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia

Email corresponding author: andisurahman.batara@umi.ac.id

ABSTRAK

Latar Belakang: Permasalahan gizi pada balita masih menjadi permasalahan utama dalam kependudukan, salah satunya adalah stunting. Untuk mengatasi permasalahan stunting, pemerintah telah menetapkan kebijakan percepatan penurunan stunting dengan fokus pada setiap upaya yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitive yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan dalam pelaksanaan program Stunting di kabupaten Enrekang.

Metode: Jenis penelitian ini adalah quasi kualitatif mengeksplorasi efektivitas kebijakan stunting melalui indepth interview, observasi dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dipilih melalui purposive sampling terhadap 1 orang sebagai informan kunci, dan 19 orang sebagai informan biasa.

Hasil : Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Enrekang dalam mendukung upaya percepatan dan penanggulangan stunting adalah Keputusan Bupati Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting di Kabupaten Enrekang dan didukung juga dengan peraturan bupati lain untuk menurunkan stunting di Kabupaten Enrekang. Peraturan bupati bertujuan untuk mempercepat penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Enrekang. Respon Masyarakat sangat positif terhadap kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang.

Kesimpulan: Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang sudah terlaksana secara maksimal.

***Kata Kunci**: Efektivitas; Kebijakan; Stunting;*

ABSTRACT

Background: Nutritional problems in toddlers are still a major problem in the population, one of which is stunting. To overcome the stunting problem, the government has established a policy to accelerate stunting reduction with a focus on every effort that includes specific interventions and sensitive interventions that are carried out in a convergent, holistic, integrative, and quality manner through multi-sectoral collaboration at the center, regions, and villages. This study aim to determine the effectiveness of policies in the implementation of the Stunting program in Enrekang district.

Methods: This type of research is a quasi-qualitative exploring the effectiveness of stunting policies through in-depth interviews, observation, and documentation. Data collection techniques through in-depth interviews were selected through a purposive sampling of 1 person as a key informant, and 19 people as a regular informant.

Results: The results of the study indicate that the policy issued by the Enrekang district government in supporting stunting acceleration and prevention efforts is the Regent's Decree Number 440/KEP/IX/2018 concerning the Stunting Care Community Movement in Enrekang Regency and is also supported by other regent regulations to reduce stunting in Enrekang Regency. The regent's regulation aims to accelerate the reduction in stunting prevalence in Enrekang Regency. The community response was very positive towards the policies implemented in Enrekang Regency.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Conclusion: Policy Effectiveness in the Implementation of the Stunting Prevention Program in Enrekang Regency has been maximally implemented.

Keywords: *Effectiveness; Policy; Stunting;*

LATAR BELAKANG

Permasalahan gizi di Indonesia sampai saat ini belum terselesaikan, perkembangan sumber daya manusia (SDM) sangat dipengaruhi oleh faktor gizi . Masalah kekurangan gizi saat ini masih cukup tinggi yaitu kurus (wasting) dan pendek (stunting) pada balita. Masalah anemia, kekurangan energy kronik (KEK) pada ibu hamil. Dampak kekurangan gizi pada ibu hamil menyebabkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), kekurangan gizi pada balita bahkan stunting.(Kementrian Kesehatan RI, 2018). Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan gizi kronis dan infeksi yang terjadi pada ibu dan balita, sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (TNP2K, 2017). Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia tahun 2019 memiliki angka stunting sebesar 27,7%, pada tahun 2020 memiliki angka stunting sebesar 26,9%, serta pada tahun 2021 memiliki angka stunting sebesar 24,4% (SSGI, 2019). Sementara, World Health Organization (WHO) memberikan target, angka stunting harus kurang dari 20% (TNP2K, 2020). Pada masa balitalah anak ditandai dengan proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Maka dari itu, asupan yang masuk ke dalam tubuh anak sangat berdampak pada kesehatannya.

Dampak stunting bagi anak dapat terjadi dalam waktu dekat maupun pada masa yang akan datang. Dampak paling dekat yang dialami oleh anak dengan stunting antara lain gangguan atau kerusakan perkembangan otak, tingkat kecerdasan (IQ) yang rendah dan melemahnya system imun yang mengakibatkan mudahnya terserang infeksi atau penyakit. Sedangkan dampak pada masa mendatang dari stunting adalah perawakan yang pendek, kehilangan produktivitas dan peningkatan biaya perawatan kesehatan, lebih besar berisiko terhadap diabetes dan kanker serta kematian dini (Bagaswoto, 2020).

WHO dan PBB telah menetapkan target untuk pembangunan status gizi. WHO telah menetapkan enam target gizi global, salah satunya bertujuan untuk mengurangi jumlah anak di bawah usia lima tahun yang stunting sebesar 40% pada tahun 2025. (WHO 2012).

Di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan stunting, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan fokus pada setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Perpres RI, 2021). Usaha penanggulangan Stunting juga dilakukan melalui Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional nomor 12 Tahun 2021 Tentang rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024. (Peraturan BKKBN, 2021).

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) menunjukkan kecenderungan Prevalensi Balita Pendek (Stunting) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami trend fluktuasi. Tahun 2010 sebesar 36,8% meningkat menjadi 40,9% di tahun 2013 dan hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan Prevalensi Balita Stunting mengalami penurunan yang cukup berarti yaitu sebesar 35,6%. Hingga akhir tahun 2019 dari hasil Pemantauan Surveilans Gizi (PSG) di Provinsi Suawesi Selatan Prevalensi Balita Stunting kembali menurun menjadi 30,09%. Diharapkan sampai dengan berakhirnya periode RPJMD nanti, Prevalensi balita stunting di Sulawesi Selatan bisa mencapai dibawah 25%.(Dinkes Sulsel Prov, 2019)

Pada tahun 2019, Sulawesi selatan masuk dalam daftar empat provinsi terbanyak yang warganya menderita stunting di Indonesia, dan Kabupaten Enrekang merupakan daerah dengan angka penderita stunting terbesar di provinsi Sulawesi selatan (Albar A, 2019). Berdasarkan data BPS-Kemenkes dan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

SSGBI 2019, prevalensi stunting di Kabupaten Enrekang merupakan kasus stunting tertinggi sebesar 43,7%. Berdasarkan data SSGI pada tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Enrekang menjadi sebesar 31,9% dan telah menempati urutan ke-8 tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan data dinas kesehatan (Dinkes) Enrekang, data balita dengan status penderita stunting pada tahun 2021 di kabupaten enrekang mencapai 22,8% atau 3.277 jiwa dari total 15.275 balita yang terdapat di kabupaten enrekang. Data tersebut berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi tahun 2021 yang dilakukan seluruh puskesmas di Kabupaten Enrekang.

Pemerintah Enrekang sendiri melakukan penggulangan stunting melalui Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 29 tahun 2020 tentang Peran Desa dalam pencegahan stunting, Peraturan Daerah Enrekang Nomor 44 Tahun 2021 tentang penurunan Stunting berbasis Pencegahan dari Hulu, Surat Keputusan Bupati Enrekang Nomor 141/KEP/III/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan hasil survei pendahuluan peneliti, perkembangan prevalensi balita stunting di Kabupaten Enrekang diketahui pada tahun 2019 prevalensi sebesar 43,71%, kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 31,9%. Berdasarkan data tersebut terlihat ada penurunan kasus stunting secara signifikan di Kabupaten Enrekang. Sehingga pada penelitian ini peneliti mengangkat judul penelitian "Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang".

METODE

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni - Juli 2022 yang berlokasi di Kabupaten Enrekang. Adapun alasan pemilihan lokasi ini yaitu berdasarkan angka prevalensi dari hasil suvey Nasional Kabupaten Enrekang Tahun 2013 adalah 53,7% (Riskesdas 2013), data hasil PSG tahun 2017 data Stunting adalah 45,8%, Riskesdas tahun 2018 yaitu 42,7%, hasil SSGBI tahun 2019 yaitu 43,7% dan data SSGI 2021 turun menjadi 31,9%. Kabupaten Enrekang berada pada kategori tinggi kasus stunting dan merupakan kabupaten lokus di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data SSBGI tahun 2019 Enrekang masih menempati posisi pertama dengan kasus tertinggi kejadian *Stunting,* Kemudian pada tahun 2021 menjadi urutan kedelapan kasus *Stunting* tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti bahwa Kabupaten Enrekang yang berhasil menekan angka kejadian stunting secara signifikan melalui implementasi Keputusan Bupati Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuasi kualitatif untuk menganalisis "Efektivitas Kebijakan dalam Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang" dengan pendekatan case study yang bermaksud untuk mengeksplorasi melalui observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi yang menggunakan metode analisis melalui komponen Input, Process, dan Output dengan mencari tahu informasi berdasarkan fakta, sistematis dengan pendekatan studi kasus.

Pada penelitian ini penentuan sumber data/ informan menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu dengan cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2002).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer ini diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (indepth interview) yang dilakukan terhadap informan, selain itu data primer juga diperoleh dari hasil observasi, data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap informan biasa dan informan kunci, sedangkan Data sekunder diperoleh dari pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam hal ini Kebijakan Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dan dokumen terkait stunting Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang Tahun 2021 serta data terkait stunting di Puskesmas tahun 2021.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Enrekang dengan waktu penelitian Juni-Juli 2022. Adapun sumber data yaitu orang–orang yang diminta memberikan informasi, dan bersedia memberikan informasi yang disebut informan (Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik Informan

No.	Inisial	Umur (Tahun)	Jabatan/ Pekerjaan	Ket
1.	MBA	66 Tahun	Bupati/ Ketua Pengaran TPPS	Informan Kunci
2.	AMN	41 Tahun	Wakil Bupati/ Ketua Pelaksana TPPS	Informan Biasa
3.	DMS	58 Tahun	Kepala Disdalduk-KB/ Sekretaris TPPS	Informan Biasa
4.	GST	51 Tahun	Kepala Puskesmas	Informan Biasa
5.	HRW	59 Tahun	Kepala Puskesmas	Informan Biasa
6.	SCN	35 Tahun	Kepala Puskesmas	Informan Biasa
7.	KTN	45 Tahun	Tenaga Gizi Dinkes/ Anggota Sek. Pelaksana	Informan Biasa
8.	HNA	48 Tahun	Kepala Bidang Disdalduk-KB/ Koord. Sek. Pelaksana	Informan Biasa
9.	DWA	58 Tahun	Asisten Kestra/ Koord. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga	Informan Biasa
10.	NMS	53 Tahun	Tenaga Gizi PKM	Informan Biasa
11.	AMW	40 Tahun	Tenaga Gizi PKM	Informan Biasa
12.	FMW	36 Tahun	Tenaga Gizi PKM	Informan Biasa
13.	SSW	37 Tahun	Bidan PKM	Informan Biasa
14.	MRN	51 Tahun	TPK	Informan Biasa
15.	RMW	44 Tahun	TPK	Informan Biasa
16.	KMW	33 Tahun	IRT	Informan Biasa
17.	DRM	40 Tahun	IRT	Informan Biasa
18.	JML	43 Tahun	KK	Informan Biasa
19.	SBR	25 Tahun	IRT	Informan Biasa
20.	RNW	25 Tahun	IRT	Informan Biasa

Input

Mengenai efektivitas input ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara dan telaah dokumen mengenai bentuk kebijakan yang dijalankan dalam mendukung program penanggulangan stunting di Enrekang. Kebijakan yang dibuat untuk penanggulangan stunting adalah Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) di Kabupaten Enrekang. dan di dukung dengan kebijakan lain seperti Peraturan Bupati Enrekang Nomor 29 tahun 2020 tentang peranan desa pencegahan stunting, Keputusan Bupati enrekang Nomor 141/KEP/III/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Enrekang, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dan MOU dengan dinas-dinas terkait.

Informasi dari kader dalam wawancaranya bahwa salah satu kebijakan terkait stunting di Kabupaten Enrekang adalah adanya Tim Pendamping Keluarga yang di atur dalam Perpres No. 72 Tahun 2021. Dan telah membuat kesepakatan MOU dengann KUA dalam pencegahan stunting. Berikut hasil wawancaranya:

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

OPEN ACCESS
E-ISSN 2774-4590

"Kebijakan program Stunting ini termasuk dalam tugas TPK (Tim Pendamping Keluarga). TPK ini merupakan sekelompok tenaga yang terdiri dari bidan, PKK dan kader KB. Adanya pembentukan TPK tentunya sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting. TPK juga telah membuat kesepakatan MOU dengan KUA mengenai program pencegahan Stunting yang dilakukan secara Nasional bukan hanya di Enrekang sehingga diharapkan terciptanya generasi sehat" (MRN, 51 tahun Informan Biasa)

Informasi juga dikembangkan oleh Kepala Puskesmas yang mengatakan bahwa bentuk kebijakan stunting di Enrekang mulai dari kerja sama lintas sector, kerja sama lintas program, pendampingan dari provinsi, kebijakan ASI Ekslusif, GEMPITA (Gerakan Masyarakat Peduli Stunting), serta Ibu Cerdas Cegah Stunting. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Kalau kita laksanakan selama ini sudah banyak kita laksanakan termasuk kerja sama lintas sector, program stunting dan dilaksanakan pelatihan-pelatihan kader posyandu dan desa itu untuk pembekalan masalah stanting karena kalau kita semua yang petugas yang turun kita tidak mampu jadi kita latih semua kader pustu posyandu dan perangkat desa untuk bisa menangani langsung di desa. Selama ini kita ada tapi itu kan program inovasi dari program kabupaten. Stunting di Enrekang dulu tinggi sekali. bahkan kita jadi lokus stunting dan Baraka jadi salah satu kecamatn yang tinggi stunting"(GST, 51 tahun Informan Biasa)

"Kalau mengenai kebijakan pemerintah sangat-sangat mendukung dibuktikan dengan adanya pendamping dari provensi disebar ke beberapa lokus, lokus stanting itu sangat-sangat membantu untuk penurunan stunting. Tahun sebelumnya stunting tinggi sekali untuk kabupaten Enrekang" (HRW, 59 tahun Informan Biasa)

"Ada program ASI, Gempita, perda rokok, ibu cerdas cegah stunting, tapi baru kayanya tahun ini di tetapkan dari daerah tapi pkm maiwa dari 2019. Karena ini tinggi Stunting di Enrekang kan. nah untuk Proses pembentukan kegiatannya di pkm itu ada Namanya PPP. Semua program membuat PPP di mulai dari masalah ditentukan masalah terus di buat RUK/ rencana usula kegiatan diliat oleh pengenlola termasuk kepala puskesmas yang di sesuaikan yang mana kegiatan dari program itu yang akan di laksanakan atau tidak" (SCN, 35 tahun Informan Biasa)

Lebih lanjut lagi menurut Wakil Bupati dalam wawancaranya diperoleh informasi bahwa bentuk kebijakan salah satunya adalah adanya TPPS (Tim Percepatan Penanggulangan Stunting) untuk mendorong percepatan penurunan stunting dengan keterlibatan seluruh stakeholder dan TPK desa/kelurahan. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Iya baru kemarin 2021 ada TPPS, kemarin ada Tim konvergensi tapi bukan saya ketua. Baru ini saya, kalau yang sekarang kebijakannya kita salah satunya dengan adanya tim percepatan penurunan angka stanting yaitu pertama kebijakan yang kita dorong adalah bagaimana keterlibatan seluruh stakeholder khususnya tim pendampin yang ada di desa dan kelurahan itu berperan aktif untuk pengidentifikasian atau pendataan."(AMN, 41 tahun Informan Biasa)

Dan juga di dukung oleh pernyataan Bupati bahwa kebijakan di Enrekang telah dibuat beberapa peraturan bupati untuk penaggulangan stuting. Berikut kutipan hasil wawancaranya:
"Antara lain kebijakan kita sudah membuat beberapa peraturan bupati ada yang dalam bentuk perda dan peraturan lain pokoknya luar biasa kebijakan yang kita ambil karena karena memang di Sulawesi selatan itu di enrekang itu lokus pencegahan stanting termasuk dengan bone. TPPS ini sesungguhnya adalah dalam rangka percepatan, penguatan untuk bagaimana secepat mungkin stanting ini kita tanggulangi di enrekang" (MBA, 66 tahun Informan Kunci)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

E-ISSN 2774-4590

Dalam kebijakan yang di laksanakan di kabupaten Enrekang melibatkan semua OPD secara lintas sector yang susunan serta perannya di atur dalam Keputusan Bupati enrekang Nomor 141/KEP/III/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Enrekang. Hal ini sesuai dengan informasi dari asisten kesejahteraan rakyat yang menyatakan bahwa dalam program pencegahan dan penanggulangan stunting semua organisasi perangkat daerah terlibat dalam pencegahan dan penurunan stunting seperti Tim Kesehatan, BAPPEDA, DISDALDUK-KB, DPMD, Tokoh masyarakat, dan kepala puskesmas. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Itu kan multisector jadi semua OPD terkait itu terlibat. Misalnya satu desa pernah ada di daerah maiwa masuk di situ jadi kesehatan itu membina dari segi apanya dinas pertanian umpanya ketahanan pangan, pembinaan melalui pemanfaatan pekarangan di desa itu, dinas kesehatannya misal penimbangan bayi, penyuluhan dll. Jadi itu dilakukan setiap tahun." (DWA, 58 tahun Informan Biasa)

Sesuai dengan pendapat Bupati dan Wakil Bupati Enrekang tentang pencegahan dan penanggulangan stunting semua organisasi perangkat daerah terlibat dalam pencegahan dan penurunan stunting secara lintas sector. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Kita banyak sekali yang berperan di samping dinas kesehatan rs dinas-dinas terkait terus ee ketua tim penggerak PKK ee mulai dari ee tingkat pemerintah kabupaten kecamatan sampai desa itu sudah terbentuk semua timnya. Ada TPPS Itu dalam rangka mempercepat pencapaian penurunan stanting di enrekang. " (MBA, 66 tahun Informan Kunci)

"Lintas sector semua kalau saya turun undang camat, undang KUA, babinsa, kapolsek pokoknya semua terlibat" (AMN, 41 tahun Informan Biasa)

Respon masyarakat di kabupaten Enrekang setelah diberlakukannya kebijakan terkait penanggulangan stunting sangat baik. Sesuai dengan informasi dari kepala puskesmas yang menyatakan bahwa masyarakat sudah sangat mendukung karena telah di edukasi. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Yah mereka bagus sangat mendukung karena kan dengan adanya edukasi-edukasi maka mereka bisa menerima. Jadi kita sebar prokes kita sebar surveilens mereka harus hadir di situ." (HRW, 59 Tahun Informan Biasa)

Informasi juga dikembangkan oleh Kepala Disdalduk-KB yang menyatakan bahwa masyarakat merespon baik hanya saja perlu terus di edukasi. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Sejauh ini direspon bagus, karena buktinya semua masyarakat berpartisipasi. Cuma memang ubah pola pikir dan pola perilaku masyarakat tidak semudah membalik telapak tangan secara continue harus memberikan edukasi dalam menyampaikan programnya." (DMS, 58 Tahun Informan Biasa)

Dan juga di dukung oleh pernyataan Bupati yang menyatakan bahwa masyarakat merespon dengan positif adanya kebijakan terkait penanggulangan stunting. Berikut kutipan wawancaranya:

"Luas biasa sangat positif karena masyarakat juga sudah takut jangan sampai ada anak keturunannya yang stanting" (MBA, 66 Tahun Informan Kunci)

Process

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Proses ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara mengenai Pelaksanaan Program Penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting di Kabupten Enrekang sudah maksimal terlaksana dengan kerjasama seluruh stakeholder secara lintas sector dan lintas program. Di Kabupaten Enrekang untuk pelaksanaan program sudah sesuai. Seluruh program terkait Untuk program Ibu hamil, program ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, ibu menyusui dan anak usia 7-24 bulan serta program pengembangan menggunakan SOP standar.

Menurut kepala dinas kependudukan dan keluarga berencana kabupaten Enrekang menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan stunting sudah maksimal yang dirasakan sampai saat. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Tahun kemarin ada penurunan, orang sudah mengatakan sudah luar biasa tetapi sekarang dilakukan lagi percepatan dari 21,5% karena kemarin 14% jadi harus lebih gencar lagi. Tapi soalan ini saya optimis dengan adanya TPK ini, apalagi program kemarin kan tidak ada begitu. Cuma dananya perlu ditambah untuk TPK" (DMS, 58 tahun Informan Biasa)

Pendapat tersebut didukung oleh pernyataan Bupati dan Wakil Bupati Enrekang dalam wawancaranya diperoleh informasi bahwa pencegahan dan penanggulangan stunting yang dirasakan sampai saat ini sudah maksimal (terlaksana) dengan kerjasama lintas sektor. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Untuk enrekang itu sangat maksimal program itu berjalan dengan sangat maksimal apalagi dengan peran para puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, ketua atau tim penggerak PKK terlibat semua terus BKKBN juga masuk balai perempuan juga masuk sampai dinas dinas lainnya juga ikut terlibat. penangannya secara lintas sectoral. kitajuga sudah ada kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya ee sekolah yang milik dinas ketahanan provinsi. kerjasamanya untuk turun penyuluhan mereka itu setiap kayak KKN begitu jadi kalau turun 1000 orang memang perorangnya bagaimana penurunan stanting khususnya di daerah lokus binaan misalnya 400 bawa ke enrekang di situ itu kerja-kerjanya bagaimana membantu daerah menurunkan stanting" (MBA, 66 tahun Informan Kunci)

"Sudah maksimal. Dimulai dari orang yang mau menikah catin. Berapa anak, berapa yang sudah melahirkan itu semua sudah dilakukan pendataan oleh tenaga pendamping keluarga di desa dan kelurahan dan sudah di klasifikasi dari sekian yang calon pengantin berapa yang mempunyai resiko stanting begitu juga orang yang sudah hamil berapa yang punya resiko stanting begitupula yang sudah lahir, setelah itu kita lakukan peng intervensian adalah bagaimana kita pertama memberikan edukasi, kedua memberikan bantuan berupa vitamin atau suplemen dll. Tapi yang paling saya tekankan kalau saya turun adalah bagaimana merubah pola hidup yang sehat karena kan ini persoalan stanting ini adalah bagaimana sederhana bagaimana memberikan pemahaman atau kesadaran kepada masyarakat untuk berubah pola pikirnya dalam aktifitas kesehariannya." (AMN, 41 tahun Informan Biasa)

Informasi dikembangkan oleh tenaga gizi Dinkes, tenaga gizi puskesmas dan bidan puskesmas yang mengatakan bahwa Program yang tercantum dalam Keputusan Bupati Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting di kabupaten Enrekang terlaksana sesuai dengan SOP. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Ada. Kalau puskesmas itu harus ada SOPnya semua program" (KTN, 45 tahun Informan Utama)

"Pakai SOP dari puskesmas" (NMS, 53 tahun Informan Utama)

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

"Ada SOP terkait program. SOP standarji" (AMW, 40 tahun Informan Utama)

"Ada SOP standar yang di pakai yang pemberrian tablet, imunisasi, makanan tambahan dan lain lain" (FMW, 36 tahun Informan Utama)

"Ada SOP standar yang di pakai untuk imunisasi, dan lain lain" (SSW, 37 tahun Informan Utama)

Informasi dikembangkan oleh Wakil Bupati dan Kepala Puskesmas yang menjelaskan bahwa semua Program yang tercantum dalam Keputusan Bupati Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting di kabupaten Enrekang terlaksana dengan koordinasi seluruh stakeholder, OPD terkait dan tenaga kesehatan serta kader. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Itu lihat saja di OPD terkait, dengan dinas kesehatan ada data-datanya disitu. tapi semua itu terlaksana." (AMN, 41 tahun Informan Biasa)

"Semua program yang di berikan sudah terlaksanakan hanya mungkin persentasenya berapa persen saya belum cek dari ke 4 program tersebut kita semua sudah laksanakan semua setiap tahunnya dan dilakukan edukasi juga masalah stanting." (GST, 51 tahun Informan Biasa)

"Berjalan. ada bidan untuk program ibu hamilnya, senam ibu hamil, ada program-program khusus untuk bumilnya." (HRW, 59 tahun Informan Biasa)

"Memang semua terlaksana." (SCN, 35 tahun Informan Biasa)

Output

Mengenai efektiviitas output ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara mengenai capaian program dan hambatan yang ditemui dalam menjalankan program penanggulangan Stunting di Kabupaten Enrekang.

Capaian program dalam Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting, yaitu angka stunting sudah menurun hingga mencapai angka 21%. Berdasarkan Data balita yang diukur dan di input ke e-ppgbm sebanyak 14.751 balita dan teridentifikasi sebanyak 3.433 balita (21,5%) mengalami stunting.

Hal ini dapat dilihat dalam data capaian PSG Kabupaten dan Capaian Program Intervensi Stunting oleh Puskesmas. Berikut data-data capaian:

Gambar 1. Capaian PSG Kabupaten Enrekang

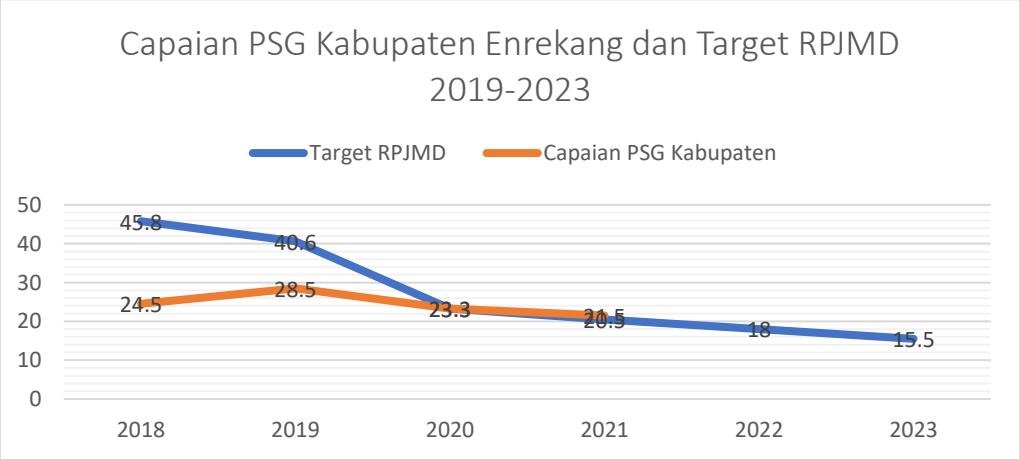

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

https://doi.org/10.52103/jmch.v4i1.1188
E-ISSN 2774-4590

Berdasarkan Target RPJMD pada tahun 2018 sebesar 45,8%, sementara berdasarkan capaian PSG kabupaten prevalensi stunting sebesar 24,5%. Kemudian di tahun 2019, target RPJMD sebesar 40,6% sementara berdasarkan capaian PSG kabupaten prevalensi stunting sebesar 28,5%. Kemudian di taun 2020 target RPJMD sebesar 23,3% sementara berdasarkan capaian PSG kabupaten prevalensi stunting menurun sebesar 23,3%. Kemudian di taun 2021 target RPJMD sebesar 20,5% sementara berdasarkan capaian PSG kabupaten prevalensi stunting sebesar 21,5%. Dan diharapkan pada tahun 2023, prevalensi stunting menurun hingga angka 15,5%.

Gambar 2. Capaian Program Intervensi Stunting di Puskesmas

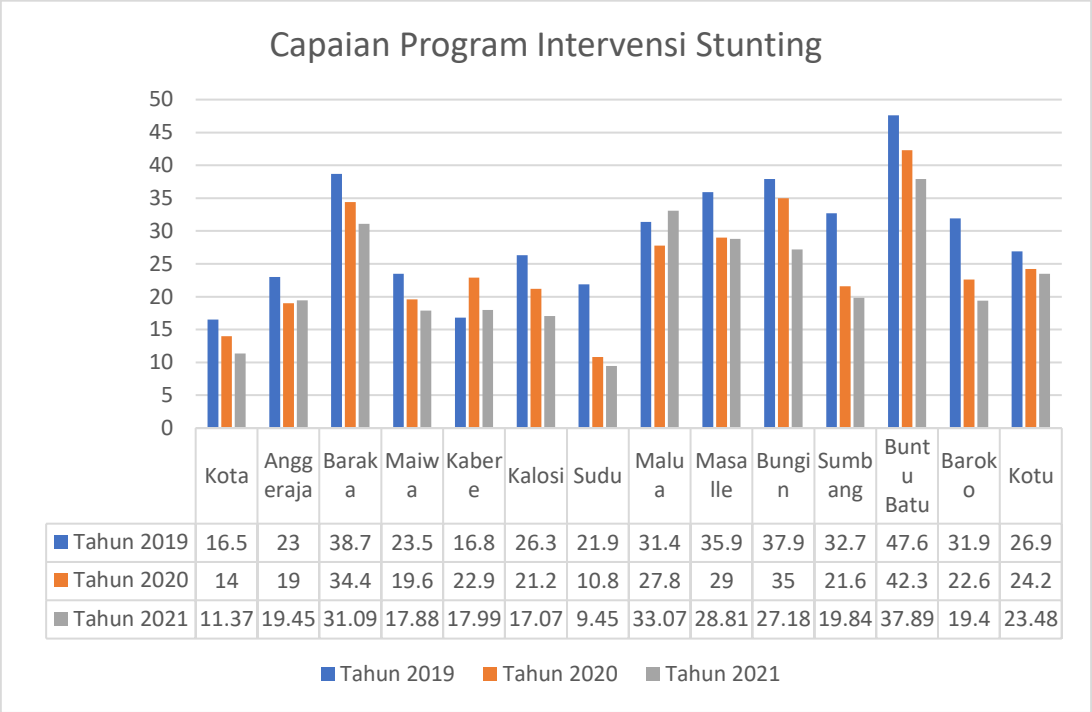

	Kota	Anggeraja	Baraka	Maiwa	Kabere	Kalosi	Sudu	Malua	Masalle	Bungin	Sumbang	Buntu Batu	Barako	Kotu
Tahun 2019	16.5	23	38.7	23.5	16.8	26.3	21.9	31.4	35.9	37.9	32.7	47.6	31.9	26.9
Tahun 2020	14	19	34.4	19.6	22.9	21.2	10.8	27.8	29	35	21.6	42.3	22.6	24.2
Tahun 2021	11.37	19.45	31.09	17.88	17.99	17.07	9.45	33.07	28.81	27.18	19.84	37.89	19.4	23.48

Pada gambar terlihat capaian program intervensi stunting oleh puskesmas di Kabupaten Enrekang. Prevalensi stunting di puskesmas Kota pada tahun 2019 sebesar 16,5 %, pada tahun 2020 sebesar 14%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 11,37%. Prevalensi stunting di puskesmas Anggeraja pada tahun 2019 sebesar 23 %, pada tahun 2020 sebesar 19%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 19,45%. Prevalensi stunting di puskesmas Baraka pada tahun 2019 sebesar 38,7%, pada tahun 2020 sebesar 34,4%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 31,09%. Prevalensi stunting di puskesmas Maiwa pada tahun 2019 sebesar 23,5 %, pada tahun 2020 sebesar 19,6%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 17,88%. Prevalensi stunting di puskesmas Kabere pada tahun 2019 sebesar 16,8 %, pada tahun 2020 sebesar 22,9%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 17,99%. Prevalensi stunting di puskesmas Kalosi pada tahun 2019 sebesar 26,3%, pada tahun 2020 sebesar 21,2%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 17,07%. Prevalensi stunting di puskesmas Sudu pada tahun 2019 sebesar 21,9 %, pada tahun 2020 sebesar 10,8%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 9,04%. Prevalensi stunting di puskesmas Malua pada tahun 2019 sebesar 31,4%, pada tahun 2020 sebesar 27,8%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 33,07%. Prevalensi stunting di puskesmas Masalle pada tahun 2019 sebesar 35,9%, pada tahun 2020 sebesar 35%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 27,18%. Prevalensi stunting di puskesmas Bungin pada tahun 2019 sebesar 37,9 %, pada tahun 2020 sebesar 21,6%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 27,18%. Prevalensi stunting di puskesmas Sumbang pada tahun 2019 sebesar 32,7 %, pada tahun 2020 sebesar 21,6%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 19,84%. Prevalensi stunting di puskesmas Buntu Batu pada tahun 2019 sebesar 47,6%, pada tahun 2020 sebesar 42,3%, Kemudian pada tahun 2021

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

sebesar 37,89%. Prevalensi stunting di puskesmas Baroko pada tahun 2019 sebesar 31,9%, pada tahun 2020 sebesar 22,6%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 19,4%. Prevalensi stunting di puskesmas Kotu pada tahun 2019 sebesar 26,9%, pada tahun 2020 sebesar 24,2%, Kemudian pada tahun 2021 sebesar 23,48%.

Data tersebut di dukung oleh pernyataan kepala dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan Kepala puskesmas kabupaten enrekang yang memberikan informasi bahwa dampak sudah sangat luar biasa dengan adanya kebijakan stunting di kabupaten enrekang dan kedepannya diharapkan seluruh stakeholder dan kader dapat lebih maksimal dalam rangka pecepatan penurunan stunting di kabupaten Enrekang. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Sudah luar biasa tetapi sekarang dilakukan lagi percepatan dari 21,5% karena kemarin RPJMD 14% jadi harus lebih gencar lagi. semoga bisa sesuai target tapi saya optimis dengan adanya TPK ini" (DMS, 58 tahun Informan Biasa)

Lebih lanjut informasi didapatkan dari wakil bupati Enrekang dalam wawancaranya bahwa capaian program mengalami penurunan dari setiap persentase yang ada. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

"Capaiannya itu mengalami penurunan dari setiap persentase yang ada itu belum berarti kita puas artinya bahwa tim selama ini sudah bekerja sudah mengalami penurunan saya tidak hapal angka-angkanya dari 40 sekian sekarang tinggal 20 sekian pokoknya ada datanya di sana yang pasti sudah menurun tapi kita mau dorong lagi lebih bagus lagi sehingga apa yang menjadi target kita di RPJMD dan di target nasional itu kita bisa capai. Iya sampai 2024 sampai 14/15% saya lupa kalau teknis begitu di OPDnya." (AMN, 41 tahun Informan Biasa)

Pendapat tersebut di dukung oleh penyataan Bupati Enrekang yang menyatakan bahwa capaian program terjadi luar biasa kemajuan mengenai penanggulangan stunting, Kabupaten Enrekang mengalami penurunan prevalensi stunting yang drastis. Berikut kutipan wawancaranya:

"Kebanyakan data membuktikan bahwa dari data awal enrekang punya stanting diatas 40% sekarang turun menjadi 22% berarti luarbiasa kemajuannya yang sesungguhnya persoalan stanting ini tidak semudah itu diturunkan karena itu kejadiannya bukan seperti orang sakit perut di obati kemudian sembuh tetapi bagaimana kalau dia pendek tidak seperti tingginya seperti orang normal kalau mau dirubah jadi normal kan sangat susah. Tapi alhamdulillah enrekang sudah drastic sekali penurunannya" (MBA, 66 tahun Informan Kunci)

DISKUSI

Input

Kebijakan untuk penanggulangan Stunting yang dilaksanakan di Kabupaten Enrekang adalah Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) di kabupaten Enrekang. Dan juga kebijakan lain yang di bentruk untuk mendukung penurunan stunting seperti Keputusan Bupati Enrekang Nomor 141/KEP/III/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu Ekslusif, Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang No 29 tahun 2020 tentang Peran Desa dalam pencegahan stunting, dan MOU dengan dinas terkait.

Penelitian ini sejalan dengan (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2017) dalam buku saku desa desa dalam penanganan stunting pemerintah telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional Penanganan Stunting pada bulan Agustus 2017, yang menekankan pada kegiatan konvergensi di tingkat Nasional, Daerah dan Desa, untuk memprioritaskan

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

kegiatan intervensi Gizi Spesifik dan Gizi Sensitif pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan hingga sampai dengan usia 6 tahun.

Penelitian ini juga sejalan dengan (Saputri RA, 2019) Daerah-daerah prioritas, seperti Kabupaten Bangka dan Bangka Barat, berinovasi membuat program-program sendiri terkait percepatan penurunan/penanggulangan stunting. Kabupaten Bangka Barat sebagai daerah dengan prevalensi stunting tertinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melahirkan sebuah inovasi yang digagas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat yaitu program/kegiatan "Bedah Desaku" yaitu program menuju desa sehat, harmonis, energik, berprestasi, amanah dan takwa.

Penelitian ini juga sejalan dengan (Masrona Y, Ainy A, 2021) Untuk mengatasi permasalahan gizi di Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman, Puskesmas Pakem telah menciptakan suatu inovasi program, yaitu "Payung Penting (Pakem Nyengkuyung Penanganan Stunting)" dan "Gaya Puspaku (Gerakan Ayah Peduli Hari Kehidupan Pertama)". Inovasi program ini diterapkan sebagai bentuk upaya penurunan angka stunting di wilayah kerja Puskesmas Pakem. Implementasi program payung penting dan gaya puspaku dinilai sudah efektif karena memberikan dampak positif dalam penurunan angka stunting di Kecamatan Pakem. Petugas juga merasa senang dan bersemangat dengan adanya program ini, dan sudah paham dengan cara kerja program.

Berdasarkan Hasil penelitian, sebagai upaya untuk pencegahan stunting di kabupaten Enrekang maka Bupati Enrekang dengan melibatkan semua organisasi perangkat daerah seperti dinas Kesehatan, DISDALDUK-KB, BAPPEDA, DPMD, Kepala Puskesmas, dan Tokoh Masyarakat untuk memberi masukan dan mengeluarkan kebijakan. Hal ini juga tercantum didalam Surat Keputusan Bupati tentang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) di kabupaten Enrekang bahwa pelaksanaan GEMPITA melibatkan lintas sector terkait, lembaga/oragnisasi kemasyarakatan, sekolah/ lembaga pendidikan, pakar dan tempat bermitra dengan swasta/dunia usaha untuk mendukung, mengkampanyekan, dan mendorong masyarakat untuk tercapainya masyarakat sehat di Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini sejalan dengan (Norsanti, 2021) Adanya kerjasama antara lintas sekor sehingga kegiatan dalam program percepatan penurunan stunting yang mendukung penurunan stunting bisa berjalan. Semua petugas bekerja sama dalam menentukan pelaksanaan kegiatan, mengarahkan masyarakat agar merubah pola pikir dan menambah pengetahuan tentang pentingnya memahami pola asuh anak dan asupan gizi yang baik untuk anak.

Penelitian ini juga sejalan dengan (Ipan, Purnamasari H, Priyanti E, 2021) Proses kolaborasi dalam penanganan stunting di UPTD Puskesmas Ciampel sudah mulai berjalan. Hal itu dapat terlihat dari adanya kerjasama diantara berbagai stakeholders bahkan stakeholders di luar pemerintahan seperti masyarakat dan sektor swasta. Sementara, untuk keterlibatan masyarakat sendiri dapat terlihat dari kehadirannya dalam kegiatan posyandu, meskipun masyarakat tidak cukup aktif. Dari hal di atas menunjukkan bahwa proses kolaborasi dengan stakeholders di luar pemerintahan sudah berjalan. Hal itu sesuai dengan perintah dari Pemerintah Pusat yang menenkankan bahwa penanganan stunting perlu melibatkan berbagai stakeholders lintas sektor. Hal itu dikarenakan permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan dari sektor kesehatan saja, melainkan juga perlu keterlibatan sektor lainnya.

Process

Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendukung berjalannya kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pelaksanaan kebijakan stunting sampai saat ini dirasa sudah maksimal (terlaksana) karena hampir setiap saat, Puskesmas dan kader kesehatan melaksanakan sosialisasi tentang penanggulangan stunting yang difokuskan pada kegiatan posyandu yang dilaksanakan setiap bulan dan kunjungan rumah yang dilakukan oleh kader.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

E-ISSN 2774-4590

Berdasarkan Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) di kabupaten Enrekang, ada 4 program yang dijalankan, yaitu program terkait ibu hamil, program terkait ibu menyusui dan anak usia 0-6 bulan, program terkait ibu menyusui dan anak usia 7-24 bulan, dan program penembangan. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan informasi bahwa semua kegiatan didalam program terlaksana dengan baik sesuai dengan SOP kegiatan puskesmas yang dilaksanakan dengan koordinasi seluruh tenaga kesehatan.

Sesuai dengan penelitian (Saputri RA, 2019) Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi terkait intervensi stunting. Di samping itu, kementerian/lembaga juga sebenarnya telah memiliki program, baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gisi sensitif, yang potensial untuk menurunkan stunting. Intervensi Program Gizi Spesifik dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Program gizi spesifik yang telah dilakukan adalah Program terkait intervensi dengan sasaran ibu hamil, Program yang menyasar Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 bulan dan Program Intervensi yang ditujukan dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan. Sedangkan terkait dengan intervensi gizi sensitif, yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian/ lembaga terkait beberapa diantaranya adalah kegiatan: Menyediakan dan memastikan akses pada air bersih melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi melalui kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Melakukan fortifikasi bahan pangan (garam, terigu, dan minyak goreng), Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB), Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal), Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua, Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal, Memberikan pendidikan gizi masyarakat, Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi serta gizi pada remaja, Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, misalnya melalui Program Subsidi Beras Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin/Rastra) dan Program Keluarga Harapan (PKH), Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Dalam kegiatan posyandu, Petugas Kesehatan dan Kader Kesehatan memberikan sumplemen yang dibutuhkan ibu dan balita, PMT, serta penyuluhan dan konseling kesehatan gizi kepada ibu hamil dan ibu balita untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Ibu balita agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik. Hasil penelitian juuga menunjukkan bahwa ibu yang memiliki balita sudah rutin membawa anaknya melaksanakan kegiatan posyandu.

Penelitian ini sejalan dengan (Saepudin E, Rizal dan Agus, 2017) tentang posyandu tidak hanya untuk pelaksanaan program penimbangan saja, melainkan sebagai pusat pelayanan kesehatan terpadu (pemeriksaan kesehatan, imunisasi, pemeriksaan tensi, pemeriksaan kehamilan, pasangan usia subur dan konsultasi kesehatan) yang dapat dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan terhadap masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan.

Peneltian ini sesuai dengan (Wulandari, Inayah, Prilly, 2020) Posyandu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Posyandu merupakan salah satu alternatif untuk pelaksanaan pencegahan stunting di Indonesia karena Posyandu menjadi pelayanan kesehatan terdekat dan paling mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat mudah untuk dipantau.

Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan informasi bahwa semua kegiatan program pengembangan juga telah terlaksana dengan koordinasi seuluruh OPD terkait, tenaga kesehatan, dan kader kesehatan. Bantuan social juga sudah banyak yang diberikan pemerintah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat seperti bedah rumah, PKH, bantuan raskin, dan BLT dari pemerintah. Hanya saja masih kurang dari keterlibatan masyarakat dalam penurunan stunting.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

OPEN ACCESS
E-ISSN 2774-4590

Rendahnya partisipasi masyarakat yang datang ke Posyandu khususnya adalah masyarakat yang memiliki balita akan melewati beberapa kegiatan posyandu seperti penimbangan, imunisasi lengkap serta pendidikan kesehatan yang dilakukan oleh posyandu (Kementerian, n.d.). Hal ini dapat memberikan dampak yang tidak baik bagi masyarakat, contohnya seperti perbedaan informasi yang didapat masyarakat yang mendapatkan informasi langsung dari posyandu dan yang tidak, balita tersebut tidak mendapatkan imunisasi dasar lengkap, dan lain sebagainya. Rendahnya pengetahuan ibu secara tidak langsung sebagai penyebab kunjungan tidak rutin ke posyandu yang kemudian membuat terjadinya stunting pada baduta (Saragih, 2018)

Berdasarjan hasil penelitian ditemukan bahwa monitoring dan evaluasi program dilaksanakan dengan mengadakan Lokakarya mini Internal Puskesmas setiap bulan dan Lokakarya mini lintas sector setiap 3 bulan. Penelitian ini seusia dengan (Arumsari, Supriyanti, Sima, 2022) Kegiatan monitoring pelaksanaan pemberian suplemen dilakukan oleh kader. Kader ini yang nantinya akan melakukan pelaporan kepada bidan desa dan kemudian disampaikan kepada puskesmas. Kegiatan pengawasan program pencegahan stunting di desa dilakukan secara berkala oleh pihak puskesmas. Pengawasan utamanya dilakukan oleh penanggung jawab program gizi dan bidan puskesmas. Pelaporan dilakukan satu bulan sekali. Pengawasan ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Demak baik secara langsung melalui rapat kerja, maupun secara tidak langsung melalui pesan teks. Setiap tiga bulan sekali, progress pelaksanaan program pencegahan stunting dipantau oleh dinas dan diberikan saran pemecahan masalah apabila terdapat kendala di lapangan.

Penelitian ini juga sesuai dengan (Rakyat, 2012) Pengawasan untuk intervensi dilakukan berjenjang mulai dari pusat ke provinsi, provinsi ke kabupaten, kabupaten ke puskesmas atau langsung dari kabupaten ke nagari yang dilakukan secara rutin. Pengawasan ini dilakukan satu kali sebulan oleh dinas kesehatan melalui bidang kesehatan masyarakat melalui Seksi gizi dan Kesehatan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam pelaksanaan program penanggulangan stunting adalah masih adanya masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Beberapa bentuk dukungan dalam menghadapi hambatan/kendala dalam pencegahan dan penaggulangan stunting adalah dengan keterlibatan stakeholder dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati.Penelitian ini sejalan dengan (Febrian dan Yusran, 2021) tentang pelaksanaan pencegahan stunting, tidak hanya menjadi kewajiban dari instansi Dinas Kesehatan saja akan tetapi melibatkan peran serta dari lembaga lain yang memiliki pengaruh terhadap kejadian stunting. Penelitian ini sejalan dengan (Permanasari Y, et al, 2020) Dalam penanggulangan *stunting* di Indonesia, memang diperlukan konvergensi yang mengintegrasikan kegiatan rutin OPD agar tercipta suatu penanggulangan *stunting* yang terintegrasi dan menyeluruh di segala aspek kehidupan.

Output

Hasil penelitian didapatkan informasi bahwa dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting adalah adalah mereka sudah mulai sadar bahwa stunting disebabkan karena kekurangan gizi kronis yang berlangsung waktu lama sekali dan masyarakat tidak asing lagi dengan istilah stunting. Selain itu pencapaian kasus stunting setelah diberlakukan kebijakan (Keputusan Bupati Nomor 440/KEP/IX/2018 Tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) di Kabupaten Enrekang), angka stunting menurun.

Selain itu dampak yang dirasakan oleh ibu hamil dan ibu balita dengan adanya kebijakan stunting di kabupaten Enrekang adalah ibu Aktif datang ke posyandu untuk menimbang anak balita merupakan upaya untuk memantau kesehatan anak atau meningkatkan status gizinya.

Penelitian ini sejalan dengan (Nurbudiwati et al, 2021) tentang hal yang mendukung masyarakat dalam pencegahan stunting adalah adanya kesempatan untuk berpartisipasi. Adanya kesempatan untuk

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

berpartisipasi dikarenakan adanya kondisi atau suasana lingkungan yang disadari oleh masyarakat untuk berpeluang atau memiliki kesempatan untuk mengikuti program-program pencegahan stunting.

Hal ini diperkuat dengan (Octaviani dkk, 2008) tentang hubungan keaktifan keluarga dalam kegiatan Posyandu dengan status gizi balita, didapatkan bahwa ada hubungan antara keaktifan keluarga ke Posyandu dengan status gizi balita. Dan juga (Tunjungsari, 2010), tentang hubungan antara keaktifan kunjungan ibu ke Posyandu dengan perkembangan status gizi anak usia 6-23 bulan, didapatkan bahwa keaktifan kunjungan ibu ke posyandu juga mempengaruhi status gizi anak.

Partisipasi ibu harus ditingkatkan dalam upaya untuk mengurangi masalah gizi buruk pada anak dengan mengunjungi dan menimbang balitanya ke Posyandu setiap bulan (Kementerian Kesehatan RI, 2015). Penelitian ini juga sesuai dengan (Astuti dan Rivqoh, 2010) Kerutinan ibu dalam mengunjungi posyandu akan sangat bermanfaat sebagai monitoring berat badan untuk mengetahui status gizi anak dengan menimbang berat badan setiap bulan agar dapat secara dini mendeteksi status kesehatan anak, sehingga dapat segera ditentukan intervensi lebih lanjut. Apabila ibu tidak secara rutin mengunjungi posyandu mengakibatkan status gizi anak tidak terpantau dengan baik.

Hal ini tidak terlepas dari peran aktif kader yang selalu mengingatkan dan memberikan informasi kepada masyarakat diwilayahnya mengenai jadwal posyandu dan pentingnya posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak.

Penelitian ini sejalan dengan (Rokhaidah, Herlina and Alita, 2021) tentang pendampingan ibu menuju masyarakat sadar stunting bahwa Ibu balita dan kader mampu memahami materi penyuluhan dan mampu melakukan pemantauan pertumbuhan anak dengan menggunakan aplikasi di HP android yang pada akhirnya dapat mendeteksi secara dini terhadap risiko stunting pada anak.

Kader kesehatan di desa yang dapat berkolaborasi dengan bidan desa harusnya dapat menjadi motor penggerak dalam mengurangi masalah kesehatan khususnya stunting. Kader kesehatan diharapkan dapat memberdayakan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan, (Purwati et al., 2018). Pemberdayaan pada kader dalam bentuk pelatihan atau Penyuluhan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan kader tentang permasalahan gizi pada masyarakat, khususnya balita sehingga kader kesehatan terpapar informasi baru guna diterapkan dalam pelayanan Posyandu (Priyono, 2022).

KESIMPULAN

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Enrekang dalam mendukung upaya percepatan dan penanggulangan stunting adalah peraturan Bupati Nomor 107/KEP/II/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA). Dan di dukung oleh kebijakan lain. Peraturan Bupati dibentuk dalam rangka percepatan penanggulangan Stunting secara konvergensi di Kabupaten Enrekang. Pelaksanaan kebijakan stunting di kabupaten Enrekang terlaksana secara maksimal sesuai dengan SOP puskesmas. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam proses penerapan Kebijkan stunting adalah Masih adanya masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang rendah. Beberapa bentuk dukungan dalam menghadapi hambatan/kendala dalam pencegahan dan penaggulangan stunting adalah dengan keterlibatan stakeholder dan organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati. Capaian yang dirasakan dengan adanya kebijakan pencegahan stunting adalah kasus stunting setiap tahunnya menurun hingga pada tahun 2021 mencapai 21,5%. Capaian program juga terlihat dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi stunting.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para informan, pembimbing, dan program pascasarjana di Universitas Muslim Indonesia yang telah mendukung kelancaran penelitian ini.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

OPEN ACCESS
E-ISSN 2774-4590

Deklarasi *Conflict of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Albar A. 2019. 3.771 Balita Menderita Stunting di Enrekang, Terbesar di Sulsel. https://makassar.tribunnews.com/2019/01/14/3771-balita-menderita-stunting-di-enrekang-terbesar-di-sulsel. [Diakses 28 April 2022)

Anonim. Kementerian Kesehatan RI 2015. Profil kesehatan Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Anonim. Kementerian Kesehatan RI 2018. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2018 tentang situasi balita pendek di indonesia.

Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Edisi Revisi V Cet. Ke-12.

Arumsari W., Supriyanti D., Sima P. 2022. Evaluasi Pelaksanaan Program Pencegahan Stunting di Era Pandemi Covid-19. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia; 10(2): 82-94.

Astuti, I., & Rivqoh. 2010. Hubungan pengetahuan ibu tentang posyandu dengan keteraturan ibu mengunjungi posyandu didesa Cibeber RW 14 Puskesmas Cibeber Cimahi. Jawa Barat: Stikes A. Yani Cimahi. Jurnal Kesehatan Kartika. Diperoleh pada tanggal 05 Mei 2017 dari http://stikesayani.ac.id/.

Bagaswoto HP, 2020. Short Term and Long Term Effect of Stunting. Makalah Dalam Seminar Kupas Tuntas Stunting RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, 06 Februari 2020.

Dinkes sulsel prov, 2019. Laporan kinerja (lkj) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2019. Makassar.

Febrian F, Yusran R. 2021. Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik; 3(1): hal 11-21.

Ipan, Purnamasari H, Priyanti E. 2021. Collaborative Governance dalam Penanganan Stunting. Kinerja; 18(3): 383-91.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi. 2017. Buku Saku Desa dalam Penanganan Stunting. Jakarta.

Kementerian, p. P. N. (n.d.). Bappenas. 2018. Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi di kabupaten/kota. Rencana aksi nasional dalam rangka penurunan stunting: rembuk stunting, november, 1–51.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Masrona Y, Ainy A. 2021. Implementasi Program Inovasi "Payung Penting" dan "Gaya Puspaku" di Puskesmas Pakem, Kabupaten Sleman, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI; 10(4): 203-8.

Norsanti. 2021. Efektivitas program percepatan penurunan stunting di kecamatan batumandi kabupaten balangan (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan; Vol.3: hal 10 – 21. https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp ISSN: 2775-0590

Nurbudiwati, Kania I., Purnawan R.A., Mufti I. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Stunting di Kabupaten Garut. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara; 7(2): 333-49.

Octaviani, U., Juniarti, N., & Mardiah, A. 2008. Hubungan keaktifan keluarga dalam kegiatan posyandu dengan status gizi balita di desa Rancaekek Kulon Kecamatan Rancaekek. Bandung: Universitas Padjadjaran. Jurnal Unpad. Diperoleh pada tanggal 14 Juli 2017 dari http://repository.unpad.ac.id/

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Permanasari Y., et al. 2020. Tantangan Implementasi Konvergensi pada Program Pencegahan Stunting di Kabupaten Prioritas. Media Penelitian dan Pengembangan Kesehatan; 30(4): 315-28.

Priyono, P. K. 2022. Pemberdayaan Kader Posyandu tentang Penanggulangan Stunting pada Balita di Desa Mlese Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten. INVOLUSI: Jurnal Ilmu Kebidanan, 12(1), 6–12. http://ojs.stikesmukla.ac.id/index.php/involusi/article/view/329/186

Purwati, Y., Salmiyati, S., & Imallah, R. N. 2018. Pendampingan Kader Kesehatan dalam Strategi Produksi dan Promosi MP-ASI. Abdimas Dewantara, 1(2), 96–108.

Rakyat, k. K. B. K. (2012). Pedoman umum penyaluran raskin tahun 2012: subsidi beras untuk masyarakat miskin. Jakarta: kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat.

Rokhaidah, Herlina, Alita R. 2020. Pendampingan Ibu Menuju Masyarakat Sadar Stunting di Desa Baros Kabupaten Serang-Banten. Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia; 3(2): 564-9.

Saepuddin E, Rizal E, Rusman A. 2017. Peran Posyandu sebagai Pusat Informasi Kesehatan Ibu dan Anak. Record and Library Journal. e-ISSN 2442-5168; 3(2): hal 201-8

Saputri RA. 2019. Upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan stunting di provinsi kepuluan Bangka Belitung. Jurnal dinamika pemerintahan; 2(2): hal 152-68.

Saragih, f. D. 2018. Peran bina keluarga remaja (bkr) dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di kelurahan durian payung kecamatan tanjung karang pusat bandar lampung. Uin raden intan lampung.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license

Tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan. 2017. 100 kabupaten/kota prioritas untuk intervensi anak kerdil (stunting): ringkasan. Jakarta.

Tunjungsari, D. M. 2010. Hubungan antara keaktifan kunjungan ibu ke posyandu dengan perkembangan status gizi anak usia 6-23 bulan. Jawa Timur: Universitas Jember. Jurnal Universitas Jember. Diperoleh pada tanggal 07 Juli 2017 dari http://repository.unej.ac.id/handle/.

WHO (Ed.) 2012. Maternal, infant and young child nutrition. (WHO, Ed.). Geneva, Switzerland: The sixty-fifth world health assembly WHA65.6.

WHO. 2012. Nutrition Landacape Information System (NLIS). Nutrition Landacape Information System (NLIS), 1–51. https://doi.org/10.1159/000362780.Interpretation

Wulandari A.T., Inayah, Prilly N.N. 2020. Analisis Perencanaan Program Pencegahan Stunting di Indonesia.

The Author(s). This Open Access article is distributed under a creative Commons Attribution (CC-BY) 4.0 license